

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Implementasi program ETLE pada Kepolisian Resort Kota Padang merupakan implementasi program yang dijalankan oleh Polresta Padang. Berdasarkan hasil temuan yang peneliti temukan maka, dapat disimpulkan bahwasanya program ETLE sudah terimplementasikan, namun belum optimal, dikarenakan ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam proses implementasinya. Pertama, masih adanya kendala dalam hal sumber daya non manusia, yakni jumlah CCTV yang ada masih belum mencukupi. CCTV hanya berjumlah 10 untuk seluruh wilayah kota padang, yang mengakibatkan tidak semua titik yang ada di Kota Padang bisa terpantau dengan pantau CCTV ETLE ini. Kedua, kendala selanjutnya adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat akan kesadaran hukum dalam berlalu lintas. Hal ini dibuktikan dari adanya masyarakat yang tidak lengkap malah menghindari dari pantau CCTV. Hal tersebut menjadikan tujuan dari hadirnya ETLE membias, yang seharusnya hadir untuk menertibkan malah menjadi ketakutan bagi masyarakat. Ketiga, peraturan yang digunakan masih bersifat umum, artinya belum ada peraturan ataupun kebijakan khusus yang membahas secara komprehensif tentang mekanisme yang terukur dari program ETLE ini. Dari berbagai macam penghambat yang terdapat dari implementasi kebijakan ini maka alhasil, kinerja dari kebijakan ini belum mampu mengakomodir goals dari tujuan dari kebijakan itu sendiri yang seyogyangnya dapat untuk memberikan kesaran hukum dalam berlalu lintas agar tingkat eskalasi dari jumlah pelanggaran dapat terus menerus turu.

Kendala-kendala tersebut yang menjadikan hambatan bagi pelaksanaan program ETLE ini untuk dapat optimal. Setelah peneliti melihat dengan seksama dan menganalisis dengan baik, maka peneliti mencoba untuk memberikan beberapa saran atau rekomendasi. Rekomendasi atau saran ini kiranya dimaksudkan agar program ini dapat terimplementasikan dengan baik, yakni sebagai berikut :

6.2 Saran

1. Perlu adanya payung hukum yang khusus membahas tentang mekanisme ETLE secara komprehensif dan detail. Hal ini bertujuan agar dasar hukum yang dimiliki dalam implementasi program ETLE ini lebih kuat dan jelas.
2. Perlu adanya penambahan CCTV agar dapat memantau keseluruhan lalu lintas Kota Padang secara menyeluruh.
3. Perlu adanya pendidikan khusus terkait adanya kesadaran hukum dan ketaatan berlalu lintas kepada masyarakat yang berkendara di jalan. Pendidikan ini dapat dilakukan ketika masyarakat ingin membuat SIM sebagai tanda atau lisenensi boleh berkendara di jalan.

